

Koperasi Untuk Pemulihan Ekonomi

Tanggal 12 Juli setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Koperasi Nasional (Harkopnas). Boleh jadi tidak semua orang mafhum hari peringatan ini. Wajar saja karena keberadaan koperasi selama ini kalah populer dibanding lembaga ekonomi-keuangan lainnya. Bermula tanggal 12 Juli 1947, diselenggarakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya. Dalam kongres ini disepakati berdirinya SOKRI (Sentral Organisasi Koperasi Seluruh Indonesia) yang kemudian menjadi Dekopin (Dewan Koperasi Indonesia). Tahun 2022 ini istimewa karena menjadi peringatan Harkopnas yang ke-75.

Gagasan koperasi di Indonesia pertama kali dikenalkan oleh Raden Aria Wiriatmadja yang mendirikan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) pada tahun 1896 di Purwokerto. Saat itu koperasi didirikan untuk melindungi rakyat kecil dari jeratan renternir akibat masuknya sistem ekonomi liberal. Tujuan ini sesuai dengan istilah koperasi yang sifatnya kooperatif. Koperasi menjadi gerakan ekonomi rakyat berasaskan kekeluargaan. Koperasi mengedepankan semangat kerja sama dan saling membantu.

Semangat kekeluargaan dan gotong royong memang begitu lekat dengan masyarakat Indonesia yang memiliki kesadaran kolektifitas tinggi. Ini yang menjadi alasan bagi Bung Hatta, Bapak Koperasi Indonesia, menyebut koperasi sebagai lembaga ekonomi yang paling cocok diterapkan di negara ini. Koperasi adalah manifestasi dari ekonomi Pancasila sekaligus saka guru perekonomian nasional. Sayangnya kapitalisme yang merangsek perlahan merusak sendi-sendi kepribadian bangsa. Kapitalisme telah memperlebar jurang kesenjangan ekonomi dan sosial dalam masyarakat.

Padahal jika dirunut, sistem koperasi telah memperoleh ruang istimewa dalam konstitusi. Atas upaya Bung Hatta, Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945 mengatur bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Lebih lanjut dalam Ayat (4), perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi. Dapat ditafsirkan bahwa koperasi merupakan salah satu

wujudnya, namun selama ini berkembang begitulah. Selain cengkeraman kapitalisme yang tak terbendung, koperasi juga sering mendapat kritikan. Serangan utamanya, koperasi dianggap tidak sesuai lagi dengan kemajuan zaman.

Koperasi sebenarnya dapat mengimbangi kekuatan kartel yang melumpuhkan kelompok usaha kecil dan menengah. Koperasi memberi pertimbangan sosial ekonomi dan melindungi kaum ekonomi lemah. Sistem perkoperasian yang sehat akan mendorong terciptanya kestabilan ekonomi, politik, dan sosial. Untuk itu keberadaan koperasi penting agar demokrasi ekonomi yang dijiwai Pancasila dapat dibangun demi terwujudnya keadilan sosial.

Kemandirian ekonomi berkelanjutan

Terkait dengan pembangunan ekonomi, impian pemerintah saat ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945 ialah tercapainya kemandirian ekonomi. Bung Hatta merumuskan beberapa kunci keberhasilan koperasi yang sejatinya bermuara pada cita-cita tersebut. *Pertama*, adanya rasa solidaritas dan gotong royong. *Kedua*, memiliki kepercayaan diri dalam persukutuan untuk melaksanakan *self help* atau usaha bersama untuk kepentingan bersama. *Ketiga*, cinta pada masyarakat yang dapat dimaknai dengan mendahulukan kepentingan bersama. *Keempat*, memiliki tanggung jawab moral dan sosial.

Nilai-nilai utama keberhasialan koperasi ini perlu ditumbuhkembangkan demi terwujudnya agenda kemandirian ekonomi. Upaya menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik seperti pertanian, perikanan, serta usaha kecil dan menengah harus disokong oleh gerakan koperasi. Gagasan-gagasan segar seperti bank petani, bank nelayan, bank pengusaha kecil dan menengah, bahkan bank sampah juga tak ubahnya koperasi dalam bentuk yang inovatif. Pengolahan pasca panen pada setiap sentra produksi tani dan nelayan juga dapat dikelola melalui koperasi.

Pengembangan koperasi dapat dilakukan pula dengan memperhatikan kearifan lokal. Banyak daerah di Indonesia yang dapat menjadi pusat industri kerajinan lokal. Hal ini tidak hanya mengangkat kekayaan budaya lokal namun juga membangkitkan perekonomian daerah yang dapat berdampak nasional. Untuk menuju pada kemandirian ekonomi secara nasional maka pusat-pusat ekonomi harus tersebar di seluruh wilayah Tanah Air. Hal inilah yang perlu digenjut oleh pemerintah agar kemandirian ekonomi berkelanjutan dapat terwujud. Terutama di masa-masa pemulihan pasca pandemi.

Kemandirian ekonomi yang berkelanjutan diperlukan demi terciptanya kedaulatan ekonomi. Arah perekonomian nasional harus kembali pada rohnya dengan menilik perjalanan sejarah bangsa. Kesadaran hidup bersama atas dasar kekeluargaan dan gotong royong telah menggariskan arah perekonomian nasional. Dengan kembali pada semangat koperasi.

si berarti kembali pada sistem ekonomi konsistuesional yang niscaya mencerahkan masa depan bangsa dan negara ini. Pemikiran ekonomi koperasi dapat diusung sebagai salah satu strategi pemulihan ekonomi dunia dalam kesempatan Presiden Indonesia G-20. Kope-

rasi harus ambil bagian dalam pem *Recover Together, Recover Stronger!*

Oleh: Hendra Kurniawan,
M.Pd.,
Dosen Pendidikan Sejarah
Universitas Sanata Dharma
Mahasiswa Program
Doktor Pendidikan
Sejarah
Universitas
Pendidikan
Indonesia

